

# Bab VII

## Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

### 7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum yang dimaksud dalam bab ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih. Kebijakan umum ini merupakan upaya untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang dilandasi ketentuan dan peraturan yang berlaku yang wajib dipedomani dan menjadi dasar penyusunan program jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan bagi lintas satuan kerja perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan menurut fungsinya untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan program pembangunan yaitu:

- a. Pelayanan umum, meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, perizinan, inspektorat, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- c. Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan, pemuda dan olah raga; pendidikan keagamaan, kebudayaan dan seni
- d. Kesehatan meliputi kesehatan dan keluarga berencana;
- e. Lingkungan hidup meliputi penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanahan;
- f. Perumahan dan Fasilitas Umum meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan dan informatika;
- g. Budaya dan Pariwisata meliputi pengembangan kebudayaan dan pariwisata;



- h. Ketertiban dan Ketentraman meliputi penegakan dan pengakuan hak azasi manusia, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana dan narkotika;
- i. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.

Selanjutnya kebijakan umum untuk masing-masing fungsi tersebut disajikan secara berturutan sebagai berikut :

### **7.1.1. Pelayanan umum**

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas rencana pembangunan yang mewadahi dinamika permasalahan daerah;
4. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung di segala bidang;
6. Peningkatan dan penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten lain;
7. Pemanfaatan esensi luhur budaya dan kearifan lokal Mandailing Natal sebagai spirit dalam pengembangan kebijakan publik;
8. Penempatan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya;
9. Pengembangan spirit kewirausahaan di kalangan angkatan kerja;
10. Pengembangan sistem pelayanan yang lebih fasilitatif dan efisien dengan melihat aspirasi masyarakat yang berkembang;
11. Pengembangan mentalitas abdi masyarakat melalui peningkatan disiplin;
12. Menciptakan kenyamanan aparatur dalam bekerja melalui penataan kantor maupun penjaminan kesejahteraannya;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan administrasi perkantoran;
14. Optimalisasi fungsi pengawasan melekat (Waskat);



15. Peningkatan kesejahteraan PNS;
16. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur melalui jalur pendidikan dan pelatihan formal;
17. Optimalisasi fungsi pelaporan;
18. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan kemampuan manajerial maupun teknis, kompetensi dan profesionalisme;
19. Pembinaan lebih intensif terhadap penyelenggara pemerintahan desa dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih efektif;
20. Menyusun sistem penilaian bagi aparatur secara lebih rasional dalam penerapan prinsip *reward and punishment*;
21. Peningkatan peran perantau Mandailing Natal dalam pembangunan Kabupaten Mandailing Natal;
22. Peningkatan kapasitas SDM birokrasi dalam penggunaan teknologi informasi;
23. Reformasi birokrasi dan memperbaharui sistem penerimaan pegawai negeri dalam menciptakan pelayanan publik yang kondusif;
24. Peningkatan informasi kepada calon investor tentang jenis perijinan dan potensi daerah yang strategis untuk pengembangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal;
25. Peningkatan Pelayanan informasi penyajian data dan pengumpulan data.
26. Peningkatan Koordinasi antar Lembaga, serta hubungannya dengan masyarakat.
27. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
28. Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan sidang-sidang paripurna dan penyampaian aspirasi masyarakat ke legislatif.
29. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset yang professional dan modern.
30. Peningkatan kemandirian sumber-sumber keuangan daerah.



### **7.1.2. Ekonomi**

1. Peningkatan Ketahanan Pangan serta meningkatkan pendapatan petani.
2. Peningkatan wawasan agribisnis petani.
3. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian,
5. Peningkatan Kemitraan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
6. Pengembangan Program Penyuluhan Desa,
7. Pengembangan metode, materi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
8. Pengembangan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dan Kehutanan
9. Pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan.
10. Peningkatan pengawasan internal dengan berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI), penataan administrasi asset, tersusunnya laporan SAI yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecuali
11. Meningkatkan peran kelembagaan pertanian
12. Penataan dan peningkatan sentra produksi dan distribusi serta penguatan institusi pasar.
13. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian.
14. Mengoptimalkan upaya diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
15. Penyediaan data dan pelayanan prima.
16. Penyediaan pengolah, ragam produk yang berdaya saing serta pangsa pasar.
17. Penyediaan SDM terlatih dan kelompok-kelompok mandiri.
18. Pengembangan lapangan pekerjaan baru dengan meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan.
19. Pengembangan Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan.
20. Peningkatan sosialisasi Peraturan tentang Kelautan dan Perikanan.



21. Pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Mandailing Natal.
22. Pengusahaan pertambangan, panas bumi dan ketenagalistrikan dan sumber daya air tanah yang baik dan benar, berwawasan lingkungan serta memanfaatkan kearifan lokal.
23. Penumbuhan kemitraan saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan.
24. Pengembangan investasi bidang pertambangan dan energi sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
25. Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dan energi.
26. Pengelolaan resiko bencana dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pengambilan air tanah dan kegiatan usaha lainnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
27. Penyediaan data dan informasi potensi bencana alam geologi (longsor, gunung api, gempa bumi) dalam rangka pembinaan, penanganan daerah rawan bencana.
28. Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya mineral, air bawah tanah dan hidrogeologi dalam rangka pengembangan usaha.
29. Pengembangan energi non migas, energi alternatif dan terbarukan.
30. Peningkatan pelayanan penyediaan energi listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
31. Pemantauan stabilitas pasokan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
32. Penyebarluasan informasi pertambangan dan energi secara baik dan benar kepada masyarakat.
33. Peningkatan aparatur yang mempunyai kemampuan teknis melalui keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan teknis industri yang diselenggarakan oleh Provinsi dan pusat.
34. Peningkatan kemampuan teknis pelaku industri untuk memperluas kesempatan berwira usaha.



35. Perkuatan struktur industri dengan pengembangan industri yang berbasis teknologi dan produk yang berdaya saing.
36. Peningkatan kemampuan mengolah Sumber Daya Lokal menjadi bahan baku industri.
37. Peningkatan Jaringan Informasi sebagai penunjang pengembangan IKM.
38. Peningkatan Pelayanan penyajian, Pengumpulan data, Informasi Industri, Investasi serta Promosi Perdagangan.
39. Peningkatan pemahaman pelaku-pelaku usaha terhadap disparitas harga dan mutu barang-barang yang beredar di pasaran.
40. Peningkatan kesadaran pentingnya tera ulang untuk pemakai alat.
41. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
42. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM.
43. Pengembangan kelembagaan Koperasi.
44. Pengembangan sistem penumbuhan wira usaha baru.
45. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM.
46. Penataan lokasi pasar sebagai salah satu faktor pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal.
47. Pengembangan pelayanan pasar melalui peningkatan manajemen pengelolaan pasar dan pengadaan sarana dan kerja.
48. Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar melalui kerja sama dengan instansi terkait.
49. Pengembangan kualitas aparaturnya dalam pemberdayaan potensi pasar sebagai sumber pendapatan daerah di bidang pasar.
50. Peningkatan klasifikasi pasar yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
51. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan pemantapan manajemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
52. Melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kerja sama dengan pemerintah pusat dan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.



53. Pemberdayaan Fungsi Ekonomi Informal dari segi pengelolaan produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi.
54. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM.
55. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk desa/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan produktifitas.
56. Peningkatan peranan, BPD dan LPMD serta kelembagaan masyarakat desa/kelurahan lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
57. Peningkatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan serta peningkatan gizi anak sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.
58. Peningkatan Ketersediaan dan kualitas Instruktur maupun Tenaga Kepelatihan.
59. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana latihan kerja.
60. Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi (seperti kejuruan) dan pelatihan berbasis masyarakat (pelatihan kewira usahaan).
61. Penguatan kerja sama dengan masyarakat di dunia usaha.
62. Pemberian Modal kerja/bantuan peralatan dan mesin kepada lulusan pelatihan yang berprestasi dan memiliki jiwa wira usaha.
63. Menciptakan tenaga kerja dan transmigran yang maju, mandiri dan handal menuju kesejahteraan sosial masyarakat.
64. Mengembangkan potensi wisata terutama ekowisata (hutan dan alam), agrowisata dan wisata sejarah dan budaya dengan membuka akses menuju obyek-obyek wisata dan mengembangkan sarana prasarananya;
65. Memberdayakan masyarakat berwawasan wisata;
66. Mengembangkan kerjasama antar daerah (khususnya dengan daerah yang sektor pariwisatanya telah berkembang) dalam pengembangan paket dan rute wisata;



### **7.1.3. Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan pembentukan karakter bangsa.
2. Peningkatan kualitas dan sertifikasi pendidik.
3. Pengembangan pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha.
4. Penguatan sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan.
5. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
6. Pengembangan kurikulum yang berbasis pada kearifan lokal, keluhuran budaya dan sejarah Mandailing Natal.
7. Rasionalisasi pendanaan pendidikan, dan pembebasan pungutan untuk pendidikan 12 tahun.
8. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam dunia pendidikan.
9. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
10. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah tertinggal dan Rawan Bencana.
11. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki aqidah yang kuat.
13. Pengembangan kurikulum berwawasan kearifan lokal, budaya dan sejarah Mandailing Natal;
14. Peningkatan kualitas atau mutu tenaga pendidik..
15. Peningkatan peran serta tenaga pendidik dan peserta didik dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pengabdian dan penelitian.
16. Menciptakan peserta didik yang memiliki keluasan ilmu agama.
17. Menumbuh-kembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan peserta didik.
18. Menghasilkan lulusan yang menjiwai nilai-nilai keilmuan.
19. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar.





20. Penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.
21. Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata.
22. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan.
23. Peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
24. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga perpustakaan dan kearsipan.
25. Peningkatan pelayanan dan mempermudah mengakses bahan-bahan pustaka dan informasi kearsipan.
26. Perkuatan kelembagaan kepemudaan.
27. Mewujudkan keserasian kebijakan kepemudaan.
28. Perluasan kesempatan pemuda memperoleh pendidikan dan ketrampilan.
29. Peningkatan peran serta pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan pembangunan.
30. Perlindungan generasi pemuda untuk mengantisipasi hal-hal yang destruktif.
31. Pengembangan manajemen olahraga, termasuk pengembangan landasan hukum yang mendukung.
32. Peningkatkan prestasi budaya olahraga secara berjenjang, termasuk pemanduan pendidikan dan pengembangan bakat.
33. Meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga.
34. Meningkatkan IPTEK olahraga.
35. Melestarikan olahraga tradisional.
36. Melestarikan dan mengembangkan budaya luhur Mandailing Natal.
37. Sosialisasi dan pembelajaran budaya Mandailing Natal.
38. Melakukan konservasi bagi kawasan dan bangunan bersejarah serta produk budaya daerah.

#### **7.1.4. Kesehatan**

1. Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Peningkatan jumlah, mutu dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis;



4. Peningkatan pengawasan terhadap lingkungan;
5. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan;
7. Penataan dan pengembangan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring.
8. Penurunan angka kesakitan (terutama malaria).
9. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit.
10. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dalam setiap program penanggulangan penyakit.
11. Meningkatkan pengetahuan petugas laboratorium penyakit.
12. Memberikan pelayanan prima dalam upaya kesehatan perorangan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pusat rujukan kepada seluruh masyarakat.
13. Menghasilkan pelayanan jasa kesehatan yang berkualitas.
14. Pemanfaatan Prosedur Tetap Standar Terapi Minimal tentang penata pelaksanaan pasien yang berobat jalan maupun rawat inap.
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana termasuk lahan dan gedung serta peralatan kedokteran.
16. Pengembangan sumber daya tenaga medis dan para medis serta pengadaan tenaga non medis yang professional dan spesialisik yang dapat meningkatkan upaya pelayanan jasa kesehatan perorangan di Rumah Sakit Umum Daerah
17. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan terutama bagi warga miskin.
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.
19. Peningkatan ketersediaan jenis-jenis obat-obat generik.
20. Peningkatan upaya dan kecepatan penanggulangan masalah kesehatan akibat terjadinya wabah, khususnya malaria dan korban bencana
21. Peningkatan kualitas lingkungan sehat di perumahan dan permukiman, sebagai upaya pencegahan penyakit.



### **7.1.5. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang**

1. Peningkatan pemahaman fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien.
2. Penguatan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, udara dan keanekaragaman hayati.
5. Pengembangan kearifan budaya Mandailing Natal dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam (khususnya hutan) serta pengelolaan lingkungan hidup;
7. Percepatan legalisasi produk-produk perencanaan yang terkait dengan ketataruangan dan pelestarian lingkungan;

### **7.1.6. Perumahan dan Prasarana Umum**

1. Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan jaringan jalan sehingga fungsi dapat dipertahankan;
2. Pengembangan jalan dan jembatan prioritas ke sistem sentra produksi, kawasan industri, dan kawasan wisata;
3. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam organisasi terkait pengelolaan sistem irigasi;
4. Perencanaan pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang rusak;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam upaya pemeliharaan dan pembangunan sistem irigasi;
6. Pembangunan, pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana air baku;
7. Mengembangkan sarana dan prasarana sungai;
8. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana bagi kawasan perumahan;
9. Pelestarian/revitalisasi kawasan dan bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya;



10. Meningkatkan kualitas permukiman;
11. Peningkatan pelayanan perhubungan dan informasi.
12. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Pengembangan terminal, pelabuhan, dan bandar udara
14. Pengembangan peralatan perhubungan dan informatika untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat.
15. Peningkatan kualitas perhubungan yang tertib dan aman.
16. Pengendalian sarana dan prasarana informasi komunikasi.

#### **7.1.7. Budaya dan Pariwisata**

1. Melestarikan dan mengembangkan budaya luhur Mandailing Natal;
2. Sosialisasi dan pembelajaran budaya Mandailing Natal;
3. Melakukan konservasi bagi kawasan dan bangunan bersejarah serta produk budaya daerah.

#### **7.1.8. Ketertiban dan Ketenteraman**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta memfungsikan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural dan fungsional yang terkait dengan penegakan peraturan daerah guna mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dan aman dalam masyarakat.
2. Mendukung kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.
3. Menyusun sistem pembinaan penegakan peraturan daerah/keputusan bupati yang efektif dan efisien dalam bentuk petunjuk pelaksanaan/teknis operasional dilapangan.
4. Turut serta menjaga dan melindungi upaya tindakan hukum segenap aparat penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan-permasalahan yang timbul dibidang penegakan peraturan daerah.
6. Menindak lanjuti solusi-solusi penegakan peraturan daerah.
7. Menyusun sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bertahap.



8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
9. Mengikutsertakan personil/pelaku penanggulangan bencana dalam setiap pendidikan dan pelatihan kebencanaan (aparatur penanggulangan bencana).
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebencanaan berbasis masyarakat.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
12. Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat .
13. Peningkatan jiwa sosial menuju terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi semangat kekeluargaan.
14. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi.

#### **7.1.9. Perlindungan Sosial**

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana
2. Peningkatan kemampuan Pengarusutamaan Gender (PUG).
3. Peningkatan partisipasi dan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
4. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Peningkatan etika moral anak dan remaja
6. Sosialisasi pemahaman tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang.
7. Penanggulangan penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang.
8. Peningkatan kualitas SDM kader KB.
9. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pelayanan KB.
10. Peningkatan SDM remaja serta Sosialisasi Generasi Berencana (Genre).
11. Peningkatan kapasitas sistem pelayanan KB.
12. Pengembangan data dan informasi kependudukan yang berbasis data mikro.
13. Penerbitan identitas dan keabsahan perubahan status dalam rangka terwujudnya SIAK secara online dan penerapan e-KTP sesuai Program Nasional.



14. Penyediaan data base hasil pendaftaran biodata penduduk sebagai bahan perencanaan pembangunan.

## **7.2. Program Pembangunan Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam arah kebijakan umum dan sekaligus melaksanakan misi Bupati Mandailing Natal terpilih, maka disusunlah program-program pembangunan dengan pengelompokan sesuai misi sebagai berikut :

### **I. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama**

Untuk menunjang misi Bupati Mandailing Natal terpilih yakni meningkatkan kualitas kehidupan beragama dilaksanakan melalui urusan pemerintahan yaitu Urusan Pendidikan. Program yang mendukung misi peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu :

- Program pengembangan pendidikan keagamaan berbasis kearifan lokal yang difasilitasi oleh pemerintah.
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas Pesantren dalam rangka menciptakan Mandailing Natal sebagai Kabupaten Santri yang difasilitasi pemerintah.
- Program peningkatan Pemahaman Al Qur'an dan kesenian Islam
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana haji
- Program peningkatan peran ormas Islam
- Program peringatan hari-hari besar keagamaan
- Program peningkatan kualitas aparatur dan kegiatan keagamaan



## **II. Misi Kedua : Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas**

Program yang mendukung peningkatan akses pendidikan yang berkualitas yaitu :

- Program Pendidikan Gratis
- Program pendidikan Anak Usia Dini
- Program pendidikan Non Formal
- Program wajib belajar pendidikan dasar
- Program pendidikan Menengah
- Program mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program standarisasi sarana dan prasarana pendidikan
- Program peningkatan pendidikan menengah kejuruan
- Program penelitian dan pengembangan Pendidikan
- Program penyediaan beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
- Program pembinaan dan pengembangan Pendidikan Tinggi
- Program pengembangan kurikulum yang berakar pada keluhuran budaya dan sejarah Mandailing Natal
- Program pengembangan kurikulum berbasis budaya dan sejarah Mandailing Natal
- Program pendidikan khusus dan layanan khusus
- Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Program peningkatan Pelayanan, Sarana, dan Prasarana perpustakaan
- Program perbaikan Sistem administrasi Kearsipan
- Program pemeliharaan kualitas pelayanan informasi
- Program pengembangan Nilai Seni Budaya Mandailing Natal
- Program Bantuan Khusus Pendidikan Keagamaan ke LuarNegeri (Kairo atau Timur Tengah)



### **III. Misi Ketiga : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial**

Program yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial yaitu :

- Program peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan rujukan
- Program penelitian dan Program Pengembangan Kesehatan
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- Program Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan
- Program kefarmasian dan sarana prasarana kesehatan
- Program pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
- Program pengobatan di daerah endemis
- Program sosialisasi dan penyuluhan peran serta masyarakat.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin
- Program penanganan korban dan dampak Bencana Alam
- Program perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
- Program pencegahan dan mitigasi Bencana
- Program kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- Program rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Program peningkatan Data dan Kualitas Informasi Tentang Bencana Alam
- Program pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- Program pemberdayaan Kelembagaan Kessos
- Program pembinaan panti asuhan / panti jompo





#### **IV. Misi Keempat : Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan**

Program yang mendukung misi peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan, yaitu :

- Program penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi
- Program pengawasan dan Pembinaan Ekonomi Masyarakat
- Program perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
- Program penataan Tata Batas Wilayah
- Program peningkatan Penataan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Program peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- Program peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan daerah
- Program penataan Administrasi Kependudukan
- Program pembinaan masyarakat dalam pengadaan jasa untuk kegiatan Pembangunan Daerah
- Program pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
- Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program pengembangan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
- Program peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- Program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- Program pengembangan data dan informasi
- Program perencanaan Pembangunan Daerah
- Program pengembangan infrastruktur Wilayah Perbatasan
- Program pengembangan Sistem Informasi data Perijinan
- Program peningkatan Investasi
- Program pembinaan Ketertiban dan Ketentraman Umum



- Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program pendidikan Politik Masyarakat

#### **V. Misi Kelima : Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal**

Program yang mendukung misi pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal yaitu :

- Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Program upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Program upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Program peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
- Program peningkatan Kualitas Hidup serta Perlindungan Perempuan dan anak
- Program pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Program penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB
- Program pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- Program pengembangan peran serta masyarakat (termasuk masyarakat perantau) dalam pembangunan
- Program pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PokMasWas)

#### **VI. Misi Keenam : Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan**

Program yang mendukung misi penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan yaitu :

- Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
- Program pengendalian sungai, erosi, dan banjir
- Program pengembangan dan Pengelolaan daerah rawa, waduk dan danau
- Program pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan Jalan dan Jembatan



- Program peningkatan Jalan dan Jembatan
- Program pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program lingkungan Sehat Perumahan
- Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- Program pengembangan Air Minum
- Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (darat, laut dan udara)
- Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau
- Program pengembangan Agribisnis Komoditas Pertanian
- Program peningkatan daya saing produk pertanian
- Program peningkatan Ketahanan Pangan (termasuk program Magadong)
- Pencetakan sawah baru
- Program peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan Produksi Hasil Pertanian
- Program pengembagan Pertanian Organik
- Program perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Program pembinaan dan pengembangan Sistem Usaha, Investasi dan Promosi
- Program penguatan kelembagaan dan permodalan usaha pertanian
- Program penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan
- Program penyuluhan Perikanan dan Kelautan
- Program penyuluhan Kehutanan
- Program penataan sistem perencanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif
- Program pengembangan kawasan agromarinepolitan
- Program pengembangan dan pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau - pulau Kecil
- Program peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan



- Program penanggulangan Abrasi Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal
- Program pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari
- Program pengembangan Satu Desa Satu komoditas
- Program pemberdayaan Masyarakat Petani
- Program pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
- Program penataan kelembagaan ketahanan pangan untuk menjamin distribusi, akses pangan dan keamanan pangan
- Program peningkatan diversifikasi konsumsi Pangan Berdaya saing lokal
- Program peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program Kemitraan usaha agribisnis
- Program pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbuka
- Program peningkatan Data Kualitas dan Informasi Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pengembangan dan Peluang Investasi Sektor Pertambangan
- Program Inventarisasi Potensi Air Tanah
- Program pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, Mineral dan energy.
- Program pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
- Program perencanaan dan Pengembangan Hutan
- Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan
- Program pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan
- Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
- Program peningkatan Pelayanan dan Pengawasan dalam Pembangunan Perkebunan
- Program peningkatan Sumberdaya Perkebunan
- Program peningkatan Peran kelembagaan perkebunan
- Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi perkebunan
- Program penataan dan peningkatan kawasan Sentra Produksi
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program pengembangan Destinasi Wisata Alam, budaya dan Sejarah



- Program Pengembangan Kemitraan untuk pengembangan Pariwisata
- Program peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Teknis Manajemen dan berwirausaha bagi pelaku UKM
- Program pemanfaatan Sumber Daya sebagai Bahan Baku Industri
- Program pengembangan Pelayanan informasi Industri Kecil dan Menengah
- Program pengembangan industri kecil menengah
- Program pengembangan usaha mikro
- Program penataan struktur industri
- Program persaingan usaha
- Program pengawasan dan Disparitas Harga Pasar dan Mutu Barang yang Beredar
- Program peningkatan Informasi Perdagangan
- Program pengembangan Ekspor
  - Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen
  - Program efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Program pembinaan kerjasama perdagangan internasional dan ekspor impor
- Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program pengawasan Usaha Koperasi
- Program peningkatan Skill Pedagang
- Program rehabilitasi, Pembangunan, dan pemeliharaan pasar
- Program peningkatan Retribusi pasar dan PAD
- Program peningkatan sarana dan Prasarana pelatihan tenaga kerja
- Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja
- Program sosialisasi, penempatan, monitoring dan perlindungan tenaga kerja
- Program pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Program pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
- Program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Program pembinaan, penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja



- Program Pembinaan dan Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Transmigrasi
- Program pembinaan sosial budaya masyarakat Transmigrasi di lokasi
- Program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan ketrampilan bagi Transmigran.

